



# Fokus Babat Empat Kemantren

## ■ Pemkot Yogya Targetkan Angka Kemiskinan 5,8 Persen di 2025

**YOGYA, TRIBUN** - Problem kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta masih berada di kisaran 6,26 persen, atau 28,79 ribu jiwa.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menandakan, jumlah tersebut sudah mengalami penurunan sekitar 0,23 persen, dibandingkan tahun 2023 lalu. Namun, dengan tren penurunan yang dianggap belum terlalu signifikan, ia pun berharap angka kemiskinan bisa semakin ditekan lagi pada 2025 ini.

"Target sudah jelas, angka kemiskinan kita yang sekarang alhamdulillah terendah di DIY, dengan angka 6,26 persen, nanti di 2025 jadi 5,8 persen," katanya, di sela FGD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, Selasa (5/8).

Adapun target sasaran pengentasan kemiskinan tahun ini berpedoman kepada pemegang Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Mengacu Keputusan Wali Kota (Kepwal) No 485 Tahun 2024, pemegang KSJPS di Kota Yogyakarta mencapai 28.792 jiwa atau 12.093 kepala keluarga (KK).

### PERLU GEBAKAN

- Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta masih berada di kisaran 6,26 persen, atau 28,79 ribu jiwa.
- Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, berharap angka kemiskinan bisa semakin ditekan lagi ke angka 5,8 persen pada 2025 ini.
- Sebagian besar warga miskin tersebar di empat kemantren, yang akan menjadi prioritas penanganan, yakni Mergangsan, Umbulharjo, Gondokusuman, dan Wirobrajan.

Merujuk data tersebut, Hasto mengungkapkan, sebagian besar warga miskin di Kota Yogyakarta saat ini tersebar di empat kemantren. Meliputi, Mergangsan sebanyak 1.759 KK, Umbulharjo 1.667 KK, Gondokusuman 1.447 KK, dan Wirobrajan 1.412 KK.

"Kalau mau ditambah, ya Mantrijeron. Itu kalau dibabat, yang tinggi-tinggi itu, penurunannya pasti bisa signifikan. Kalau kabeh diayahi, abot (kalau semua langsung ditangani, berat). Maka, kita

babat prioritas, paling banyak di lima kemantren, istiatinya dipaksa turun," tandasnya.

Menurutnya, dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah tidak bisa sekadar menggantungkan program-program dari atas atau pusat. Sebaliknya, gebrakan-gebrakan dari para lurah, atau mantri pamong praja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menjadi ujung tombak.

"Dalam keadaan efisien, kita fokus, ayolah lurah-lurah, camat, yang gesit. Ke depan, kalau milih lurah, saya akan pilih yang bisa lari kencang dan kerja keras. Jangan dianggap pejabat-pejabat di keturahan itu buangan," tegasnya.

### Tiga strategi

Pemkot Yogyakarta menggelontorkan anggaran Rp89,3 miliar dari APBD 2025 untuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu, intervensi problem kesejahteraan masyarakat pun mendapat dukungan penuh dari kurucuran APBD DIY, APBN, hingga *corporate social responsibility* (CSR) korporasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menuturkan, terdapat tiga strategi utama yang dilaksanakannya. Meliputi, mengurangi

beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meminimalkan kantong kemiskinan, dan menciptakan sinergi program penanggulangan kemiskinan.

Ia mengungkapkan, program-program itu dijabarkan dalam kegiatan teknis di 12 instansi, atau organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu. Misalnya, untuk mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan PKH dan bansos sembako, jaminan pendidikan daerah, jaminan kesehatan, santunan kematian, dan lain sebagainya.

"Anggaran terbesar untuk mengurangi beban pengeluaran ada di Dinkes berupa jaminan kesehatan, lalu Disdikpora yang dialokasikan untuk jaminan pendidikan daerah dan PIB," ujarnya.

Sekretaris TKPK Kota Yogyakarta itu menyebut, dokumen pedoman penanggulangan kemiskinan telah disusun sebagai acuan untuk lima tahun ke depan, atau 2025-2029. Dengan dokumen tersebut, diharapkan 12 OPD yang mengampu program penanggulangan kemiskinan bisa mendapatkan gambaran lebih terukur.

"Tapi, peran serta dari masyarakat, baik komunitas, pengusaha, swasta maupun perguruan tinggi, sangat diharapkan sebagai bentuk sinergitas," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005